

Penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS

Oleh:

Yusuf Budi Prasetya Santosa
Universitas Indraprasta PGRI
prasetyabudi29@gmail.com

Arief Hidayat
Universitas Indraprasta PGRI
ariefhidayat1610@gmail.com

Submitted: 06-08-2022

Reviewed: 01-09-2022

Accepted: 06-10-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif pilihan kepada para Guru IPS menengai cara penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research* dimana pengumpulan data dilakukan dengan penggalan beragam informasi kepustakaan. Hasil penelitian ini didapat, jika penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS dapat dilakukan, meskipun bukan proses yang mudah. Hal ini disebabkan karena tema dan materi dalam mata pelajaran IPS masih terlalu banyak. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi pembelajaran peserta didik. Guru IPS sebagai fasilitator pembelajaran harus dengan cermat melihat materi yang akan digunakan sebagai media penanaman nilai-nilai demokrasi karena tidak semua materi dapat digunakan. Metode yang dipergunakan dalam penanaman nilai demokrasi yang paling sesuai adalah diskusi disebabkan oleh karkteristik metode ini yang memungkinkan peserta didik dapat menerapkan berbagai ketrampilan sosial yang sesuai.

Kata kunci: nilai, nilai-nilai demokrasi, mata pelajaran IPS, pembelajaran IPS

Abstract

This study aims to provide a choice for social studies teachers regarding how to inculcate democratic values through social studies learning. The research method used in this study is the library research method where data collection is carried out by extracting various library information. The results of this study are obtained if the inculcation of democratic values through social studies learning can be carried out, although it is not an easy process. This is because there are too many themes and materials in social studies subjects. This can affect the interest and motivation of students' learning. Social studies teachers as learning facilitators must carefully look at the material that will be used as a medium for inculcating democratic values because not all materials can be used. The most appropriate method used in inculcating democratic values is discussion due to the characteristics of this method which allows students to apply various appropriate social skills.

Keywords: values, democratic values, social studies subjects, social studies learning

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Fondasi demokrasi Indonesia terdapat di dalam dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dalam sila ke dua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke empat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernyataan jika negara Indonesia dijalankan dengan sistem demokrasi juga tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1, ayat 1 yakni, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahkan jika melihat kepada sejarah negara Indonesia didirikan atas dasar sikap dan semangat demokrasi. Salah satu peristiwa sejarah yang membuktikan jika negara Indonesia didirikan atas dasar sikap dan semangat demokrasi ialah peristiwa sidang BPUPKI pada 1945.

Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Secara harfiah demokrasi memang cenderung kepada sistem pemerintahan atau politik. Namun seiring dengan perkembangan jiwa zaman (*zeitgeist*) demokrasi mengalami perkembangan makna. Demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan atau politik namun juga sebagai pedoman hidup suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang semakin tinggi, kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit, sehingga demokrasi sulit didefinisikan (Fatah, 2004). Setidaknya ada tiga ruang lingkup demokrasi yang dikenal saat ini, yaitu demokrasi sebagai sistem pemerintahan, sistem politik dan sikap hidup.

Jon Dewey dalam (Setiyadi, 2008) sikap demokrasi telah tumbuh apabila suatu masyarakat telah memiliki sistem yang mengatur kegiatan dengan baik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sistem-sistem itu tidak dijalankan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran yang dimiliki oleh para individu di dalam suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Hatta, bahwa syarat hidupnya demokrasi ialah rasa tanggung jawab dan toleransi (Hatta, 1966). Sikap demokrasi yang ada di masyarakat tertuang dalam nilai-nilai demokrasi. Menurut Amril Mansur, nilai sendiri dalam tataran praktis memiliki indikator, seperti menarik, dicari, menyenangkan, diinginkan dan disukai dalam pengertian yang baik atau berkonotasi positif (Mansur, 2006).

Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di lingkungan tersebut (Adisel & Suryati, 2021). Menurut (Notonagoro, 2013) terdapat empat indikator nilai demokrasi, diantaranya (1) menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam

suatu lingkungan yang sedang berubah; (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; (4) menjamin tegaknya keadilan.

Namun belakangan media massa marak memberitakan terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diberitakan diantaranya, gerakan separatisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, perilaku korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, persaingan yang tidak sehat antara partai politik, maraknya kasus SARA di masyarakat dan masih banyak lainnya. Hal tersebut telah menyalahi demokrasi sebagai sikap hidup. Arus globalisasi yang melunturkan rasa nasionalisme, empati dan solidaritas dalam masyarakat, khususnya kalangan generasi muda menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran demokrasi di Indonesia. Pengaruh-pengaruh tersebut memang tidak akan dirasakan secara langsung, namun secara berkala akan terus mengurangi rasa nasionalisme hingga bisa menghilang dalam diri setiap individu warga negara (Galuh Mahardika & Nur Ramadhan, 2021). Dan jika dibiarkan tentu akan mempengaruhi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penanaman nilai demokrasi menjadi penting dan salah satu cara menanamkan nilai demokrasi ialah dengan proses pembelajaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanaman merupakan proses, cara, perbuatan menanam, menanamkan atau menanamkan (Nasional, 2008). Sedangkan arti nilai dalam KBBI dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya (etika) (Nasional, 2008). Penanaman nilai dalam perspektif pendidikan dapat diartikan sebagai proses transformasi atas pengetahuan (suatu) konseptual menjadi sebuah tindakan yang dapat diaplikasikan (berguna) dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses penanaman nilai diharapkan individu sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat dapat berperan sesuai dengan peran dan nilai-nilai yang berlaku. Penanaman nilai dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal. Proses pendidikan informal dilakukan di keluarga, sedangkan pendidikan formal melalui institusi pendidikan seperti sekolah.

Penanaman nilai demokrasi melalui pendidikan formal dilakukan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik (Sardiman, 2014). Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk proses penanaman nilai demokrasi ialah melalui pembelajaran IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), IPS merupakan salah satu program studi (Suhada, 2017). Di negara lain mata pelajaran IPS dikinal dengan

nama *social studies*, sedangkan nama IPS di Indonesia merupakan istilah yang disepakati oleh para ahli.

Ruang lingkup *social studies* meliputi ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat yang dalam praktiknya dipilih untuk pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi (Nasution & Arafat Lubis, 2018). Tujuan pembelajaran IPS menurut National Council Social Studies (NCSS), yaitu "*The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of culturally diverse, democratic society in an interdependent world*" (Sapriya, 2009). Jadi, penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para generasi muda, khususnya peserta didik tentang bagaimana menjadi warga negara yang tidak hanya berperilaku baik, tetapi juga memiliki wawasan luas mengenai kebudayaan yang ada dan berkembang di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (Syaodih, 2009). Menurut (Denney & Tewksbury, 2013) literatur *review* merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau ide penelitian selanjutnya.

Sumber yang digunakan dalam metode literatur ini antara lain, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan IPS, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, dan buku-buku teks yang berhubungan dengan Pendidikan IPS dan seputarnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan berkunjung ke perpustakaan atau melalui media internet. Setelah mendapatkan berbagai bahan yang diperlukan, penulis melakukan proses verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis dari setiap sumber.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Mata Pelajaran IPS

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pada kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum Merdeka 2022 hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Mata pelajaran IPS seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial (Susanti & Endayani, 2018).

National Council for the Social Studios (NCSS), mendefinisikan IPS sebagai suatu studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kemampuan warga negara. Dalam program sekolah, IPS mengkaji secara sistematis dan terkoordinasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, dan materi yang sesuai dengan humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam (Endayani, 2018). IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya (Samlawi & Maftuh, 1998).

Sebagaimana mata pelajaran lainnya, mata pelajaran IPS memiliki karakteristiknya sendiri. Terdapat dua karakteristik pembelajaran IPS antara lain, merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial, seperti geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, humaniora dan pendidikan agama. Kedua standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS berasal dari berbagai ilmu sosial tersebut yang menjadi pokok bahasan atau tema (Ida Bagus Made Astawa, 2017).

Meskipun terlihat seperti gabungan dari berbagai disiplin ilmu sosial, akan tetapi pendidikan IPS sebagai sebuah keilmuan memiliki perbedaan, yakni IPS bukan lah disiplin ilmu mandiri seperti ilmu sosial lainnya. Pendidikan IPS berfokus pada kajian mengenai aspek kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan atau unidimensional (Susanti & Endayani, 2018). Selain itu IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan, tidak seperti ilmu sosial lainnya yang mengedepankan aspek akademis. Dengan kata lain IPS merupakan sintesis antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan (Endayani, 2018). Pembahasan disajikan dengan tujuan: 1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; 2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh; 3) menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh; 4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada.

Pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri atau masyarakat (Susanti & Endayani, 2018). *National Council for the Social Studios* (NCSS) merumuskan tujuan pembelajaran IPS untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan, yang berguna bagi kehidupan bernegara secara demokrasi (Al lamri & Tuti Istianti Ichas, 2006).

Fungsi pembelajaran IPS menurut Ishack dalam (Udin S. Winataputra, 2007), antara lain 1) memberi bekal pengetahuan dasar bagi peserta didik yang berguna bagi kehidupan sehari-hari; 2) mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep IPS; 3) menanamkan sikap ilmiah dan melatih peserta didik dalam menggunakan metode ilmiah sebagai pemecahan masalah yang ditemukan; 4) memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kekayaan alam, sehingga

berdampak kepada munculnya rasa cinta dan memiliki; 5) memupuk daya kreativitas dan inovatif peserta didik; 6) memfasilitas peserta didik untuk memahami gagasan di bidang IPTEK; 7) meningkatkan minat peserta didik terhadap IPS.

Hakikat Nilai Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu paham atau ideologi yang ada dan telah diterapkan di berbagai negara dan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sejak awal kemerdekaannya telah memilih demokrasi sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Bahkan demokrasi secara kontekstual telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Demokrasi juga dapat diartikan dengan kekuasaan yang berada di 'tangan' rakyat atau didasari pada kehendak rakyat. Demokrasi sebagai pandangan politik ialah bagaimana kekuasaan berasal, didapatkan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Sebagaimana dalam pandangan Abraham Lincoln yang mengatakan jika demokrasi adalah *government of the people, by the people, for the people* (Jane Theresia Silaban et al., 2013).

Selain sebagai pandangan politik, demokrasi juga merupakan pandangan hidup bernegara. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi merupakan nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi, antara lain toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku (Setiyadi, 2008).

Menurut (Notonagoro, 2013) terdapat empat indikator nilai demokrasi, diantaranya (1) menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah; (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; (4) menjamin tegaknya keadilan. Berdasarkan berbagai uraian mengenai nilai demokrasi maka dapat disimpulkan, jika nilai demokrasi merupakan keyakinan yang terdapat di masyarakat, yang menjadi pedoman dalam berkehidupan berdemokrasi. Nilai demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada indikator nilai demokrasi menurut Notonagoro.

Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman di lingkungan sekolah, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah (Nurul Zuriah, 2014). Nilai-nilai demokrasi sangat perlu untuk ditanamkan pada diri peserta didik. Tujuannya untuk menghadirkan proses pembelajaran yang lebih demokratis di sekolah. Selain itu nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan ke dalam peserta didik nantinya diharapkan akan menjadi pribadi yang baik sebagai individu maupun anggota komunitas.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki nilai-nilai demokrasi di dalamnya ialah mata pelajaran IPS. Mata pelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis. Setidaknya terdapat empat indikator nilai-nilai demokrasi menurut Notonegoro (2013) yang dapat disinergikan dengan Pendidikan IPS, antara lain:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama.

Di dalam kehidupan bermasyarakat peserta didik tentunya akan dihadapkan dengan berbagai kondisi dan persoalan. Salah satunya kondisi dan persoalan yang akan dihadapi oleh para peserta didik ialah konflik. Di dalam masyarakat sebuah konflik atau pertentangan senantiasa terjadi. Perbedaan pendapat biasanya menjadi akar permasalahan dalam setiap konflik, baik antar individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Namun yang terpenting ialah bagaimana peserta didik dapat menyikapi konflik tersebut secara damai dan bersama. Dimana peserta didik dapat memahami jika perbedaan yang terjadi adalah bagian dari dinamika di dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan nilai dalam IPS, yakni untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam peserta didik, agar peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Susanti & Endayani, 2018).

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah.

Masyarakat sebagai tempat peserta didik menjalani kehidupannya sehari-hari sangat lah dinamis. Hal ini disebabkan pelbagai pengaruh yang diterima oleh masyarakat baik dari luar, maupun dari dalam. Akibatnya masyarakat selalu mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun lambat, besar maupun kecil, atau yang dikehendaki maupun tidak. Dalam hal ini pendidikan IPS telah memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang wajar dan alami. Hal ini telah sesuai dengan standar proses kompetensi IPS yang akan dimiliki peserta didik, yakni kemampuan berkomunikasi, mengidentifikasi dan menganalisis, serta menyusun pemecahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan di masyarakat (BSNP, 2007).

3. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Keanekaragaman merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman yang dimaksud, mulai dari keragaman ras, suku, agama, dan bahasa. Oleh karena itu sudah seharusnya peserta didik menganggap jika keanekaragaman yang ada merupakan hal yang wajar, dan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendidikan karakter di dalam Pendidikan IPS yakni memberikan pengetahuan moral, perasaan moral, perilaku moral sebagai landasan dalam berkehidupan sehari-hari.

4. Menjamin tegaknya keadilan.

Penegakan keadilan menjadi poin terakhir dari nilai-nilai demokrasi yang dapat disinergikan dalam pendidikan IPS dalam pemahaman Notonegoro. Indonesia merupakan negara hukum. Dimana seluruh masyarakatnya, tanpa memandang perbedaan status sosial harus patuh di bawah hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu untuk hidup bernegara guna tegaknya keadilan. Akan tetapi dalam pandangan sosial keadilan yang dimaksud bukan hanya dari perspektif hukum, melainkan juga dari perspektif sosial. Hal ini sesuai dengan definisi IPS, yakni bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan (Ischak SU, 1997).

Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Tema-tema dalam Pembelajaran IPS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanaman adalah suatu proses, cara, perbuatan menanam, menanamkan atau menanamkan (Nasional, 2008). Sedangkan nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang diyakini secara psikologis dan telah menyatu pada diri individu. Nilai juga sering dikaitkan dengan peraturan yang mengatur hidup individu atau masyarakat agar tidak berperilaku menyimpang. Jadi penanaman nilai dalam perspektif pembelajaran dapat diartikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer suatu standar perilaku ke dalam diri peserta didik.

Nilai demokrasi merupakan salah satu nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik ialah pembelajaran IPS. Melalui pembelajaran IPS peserta didik diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting pembelajaran IPS disini ialah mampu menjadikan peserta didik warga negara yang baik dan bermoral, dan memiliki karakter yang demokratis.

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan menyisipkannya di dalam setiap materi yang terdapat dalam tema pada mata pelajaran IPS. Tema mata pelajaran IPS dalam kurikulum terbaru, yakni Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2022 terdiri dari empat tema yakni sejarah, sosiologi, ekonomi dan geografi. Dimana pada tema sejarah mengkaji manusia dalam ruang dan waktu, tema sosiologi mengkaji individu dan masyarakat Indonesia, tema ekonomi mengkaji upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan tema geografi mengkaji interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya (Sari Oktafiana dkk, 2021).

1. Penanaman Nilai-nilai Demokrasi dalam Tema Sejarah Indonesia

Sejarah merupakan salah satu tema dalam mata pelajaran IPS yang mengkaji tentang manusia dalam ruang dan waktu. Dimana para peserta didik akan mempelajari konteks manusia yang hidup di dalam ruang dan waktu. Peserta didik akan mempelajari

sejarah sebagai sebuah ilmu, bagaimana mencapai tahapan berpikir dengan berlandaskan pemahaman sejarah atau *historical thinking*, sampai akhirnya mengetahui dan mampu memahami fungsi praktis sejarah. Capaian pembelajaran pada tema sejarah dalam mata pelajaran IPS, antara lain peserta didik dapat memahami berbagai konsep sejarah sebagai sebuah ilmu. Kemudian pemahaman mengenai berbagai dasar atau konsep tersebut dapat membantu peserta didik untuk melakukan analisa terhadap pelbagai fenomena sejarah dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga semuanya bermuara pada semakin menguatnya rasa nasionalisme dalam diri peserta didik (Sari Oktafiana dkk, 2021).

Nilai-nilai demokrasi dapat dimasukkan ke dalam materi-materi yang terdapat pada tema Sejarah Indonesia dalam mata pelajaran IPS. Salah satu materi yang terdapat tema Sejarah Indonesia, yang dapat digunakan untuk menjadi media penanaman nilai-nilai demokrasi, seperti manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Di dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA Kelas X Kurikulum Merdeka, tema Sejarah Indonesia, materi manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, sub materi a. manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah terdapat sebuah artikel yang berjudul Ki Hadjar Dewantara: "Lebih Baik Tak Punya Apa-Apa Tapi Senang Hati Daripada Bergelimang Harta Namun Tidak Bahagia" (Sari Oktafiana dkk, 2021).

Artikel ini menceritakan secara singkat perjalanan hidup dan perjuangan seorang pahlawan nasional bernama Ki Hadjar Dewantara. Dari artikel ini guru dapat membantu peserta didik dalam memetik nilai-nilai demokrasi sesuai indikator nilai demokrasi Notonegoro, (1) menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama dan (4) tegaknya keadilan. Pada artikel ini dapat diketahui jika Ki Hadjar Dewantara bersama dua rekannya tetap menyikapi perlakuan Pemerintah Hindia Belanda yang semena-mena secara damai dan lebih memilih mematuhi proses hukum walaupun diperlakukan tidak adil.

2. Penanaman Nilai-nilai Demokrasi dalam Tema Sosiologi

Fokus kajian tema sosiologi dalam mata pelajaran IPS ialah kajian individu dan masyarakat dalam konteks masyarakat Indonesia. Pada tema ini peserta didik akan mempelajari beberapa topik sosiologi seperti tindakan sosial, interaksi sosial, lembaga sosial dan heterogenitas sosial. Capaian pembelajaran tema sosiologi ialah peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan pengetahuan sosiologi untuk mengenali identitas diri dan lingkungan sosial sekitarnya yang beragam atau berkebinekaan beserta permasalahannya (Aditiya, 2017). Penanaman nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan melalui materi-materi yang terdapat dalam tema sosiologi pada pembelajaran IPS.

Di dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA Kelas X Kurikulum Merdeka terdapat salah dua materi dalam tema sosiologi pada pembelajaran IPS, antara lain interaksi sosial dan heterogenitas sosial (Sari Oktafiana dkk, 2021). Penanaman nilai-nilai demokrasi sangat mungkin dilakukan pada materi interaksi sosial. Hal ini dikarenakan tujuan materi interaksi sosial ialah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang peran seorang individu dalam kelompok atau masyarakat, nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat dan penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Indikator nilai-nilai demokrasi menurut Notonegoro yang dapat ditanamkan melalui materi interaksi sosial ialah (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Dimana guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik jika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan konsekuensi logis atas terjadinya interaksi sosial. Selain itu guru dapat menampilkan beberapa contoh perubahan-perubahan di masyarakat yang terjadi akibat dari interaksi sosial. Nilai demokrasi menurut Notonegoro lainnya yang dapat ditanamkan melalui materi pada tema sosiologi dalam pembelajaran IPS, yakni (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dapat ditanamkan melalui materi heterogenitas sosial. Dimana pelapisan sosial merupakan bagian dari heterogenitas sosial merupakan hal yang wajar dan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat. Guru dapat memberikan berbagai contoh heterogenitas sosial yang terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari peserta didik.

3. Penanaman Nilai-nilai Demokrasi dalam Tema Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu tema dalam pembelajaran IPS. Fokus tema ekonomi dalam pembelajaran IPS ialah mengkaji upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang beragam (terbatas dan tidak terbatas). Di dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA Kelas X Kurikulum Merdeka, materi yang terkandung dalam tema ekonomi pada mata pelajaran IPS, antara lain sejarah dan konsep ilmu ekonomi, serta cara manusia berekonomi. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai ialah peserta didik mampu membedakan dengan jelas antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*), serta memahami abstraksi murni seperti filsafat dan konsep matematika ekonomi yang lebih tinggi (Sari Oktafiana dkk, 2021).

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui tema ekonomi dalam mata pelajaran IPS dapat dilakukan pada materi pengantar ilmu ekonomi, sub materi sejarah ilmu ekonomi. Nilai demokrasi berdasarkan indikator Notonegoro yang dapat ditanamkan melalui materi tersebut ialah (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Pada sub materi sejarah ilmu ekonomi peserta didik mempelajari bagaimana proses perkembangan aktivitas ekonomi dari masa ke masa. Dimana aktivitas ekonomi dimulai sejak masa prasejarah ketika manusia hanya memahami cara berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian berkembang dengan mengenal sistem barter hingga akhirnya menemukan satuan alat hitung yang disebut uang. Semua itu merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi di suatu kelompok atau masyarakat, yang diakibatkan perkembangan kompleksitas dan kondisi lingkungan manusia. Peserta didik diharapkan dapat menerima berbagai perubahan di bidang ekonomi di masa depan secara rasional dan damai.

4. Penanaman Nilai-nilai Demokrasi dalam Tema Geografi

Geografi merupakan tema terakhir dalam mata pelajaran IPS. Di dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA Kelas X Kurikulum Merdeka materi pada tema geografi dalam mata pelajaran IPS antara lain, pendekatan geografi, objek geografis, konsep dan

prinsip geografi, peta, pengindraan jauh, Sistem Informasi Geografis (SIG), penelitian geografi dan fenomena geosfer (Sari Oktafiana dkk, 2021). Capaian pembelajaran tema geografi dalam mata pelajaran IPS diantaranya, peserta didik mampu menganalisis dan mengembangkan ide atau solusi tentang keberagaman fisik dan sosial terhadap keberagaman wilayah secara fisik dan sosial berdasarkan ilmu pengetahuan geografi.

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui tema geografi dalam mata pelajaran IPS dapat diberikan pada materi pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*). Nilai demokrasi berdasarkan indikator Notonegoro yang dapat dimasukkan ke dalam materi ialah (3) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Pada materi ini peserta didik diberikan pemahaman jika keberagaman keruangan maupun ekologi di suatu wilayah, dipengaruhi oleh cara pandang, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Misalnya kasus bencana banjir di suatu wilayah tidak hanya dianggap sebagai akibat dari rusaknya ekologi di wilayah tersebut, namun juga dipengaruhi faktor manusia yang tinggal di wilayah tersebut.

Simpulan

Demokrasi di Indonesia tidak hanya merupakan pandangan atau sikap politik, akan tetapi juga merupakan pandangan dalam kehidupan bernegara. Sebagai pandangan dalam kehidupan bernegara demokrasi merupakan nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud antara lain toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami, dan menyadari jika kemajuan merupakan kekuatan, serta mampu mengendalikan diri untuk hidup dalam kemajuan yang ada. Nilai-nilai demokrasi yang terdapat di masyarakat perlu untuk dipertahankan secara kontekstual. Agar nilai-nilai demokrasi dapat bertahan, salah satu caranya ialah melalui proses pembelajaran yang merupakan tahap instruksional dalam pendidikan. Pembelajaran IPS sebagai salah satu pembelajaran yang ada dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Penanaman nilai demokrasi dilakukan dengan menyisipkannya di dalam setiap materi dalam tema-tema pembelajaran IPS.

Seperti penanaman nilai demokrasi dalam tema sejarah pada pembelajaran IPS dapat disisipkan pada materi manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, subtema manusia sebagai penggerak, pelaku dan saksi sejarah yang terdapat pada kisah hidup Ki Hajar Dewantara yang dengan gigih mempertahankan keyakinannya dalam berjuang, dan memilih untuk tidak melawan dengan cara-cara yang membuat kegaduhan dalam menegakkan keadilan. Pada tema sosiologi dapat disisipkan melalui materi interaksi sosial dan heterogenitas sosial. Tema tersebut sangat sesuai dengan indikator nilai demokrasi Notonegoro, yakni menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Pada tema ekonomi dapat disisipkan melalui materi pengantar ilmu ekonomi, submateri sejarah ilmu ekonomi. Dimana pada submateri tersebut sesuai dengan salah satu indikator nilai demokrasi menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Pada tema geografi dapat disisipkan melalui materi pendekatan kompleks wilayah yang

sesuai dengan indikator nilai demokrasi mengakui serta mengaggap wajar adanya keberagaman.

Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS dapat dilakukan, meskipun prosesnya tidak terbilang mudah. Hal ini dikarenakan banyaknya materi dalam tema pada mata pelajaran IPS. Banyaknya materi tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit dalam pembelajaran. Alhasil guru secara tidak sadar akan terorientasi pada penyelesaian materi pembelajaran, bukan pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Selain itu banyaknya materi pada setiap tema pembelajaran IPS akan berdampak tidak langsung kepada minat dan motivasi belajar peserta didik. Maka dari itu penanaman nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ditemukan oleh guru.

Referensi

- Adisel, & Suryati. (2021). Pengembangan nilai-nilai demokratis mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *IJOCE: Indonesian Journal of Civic Education*, 1(2), 69–75.
- Al lamri, I. H., & Tuti Istianti Ichas. (2006). *Pengembangan nilai dalam pembelajaran pengetahuan sosial dasar*. Departemen Pendidikan Nasional.
- BSNP. (2007). *Standar Proses*. Permendiknas No 41 Tahun 2007.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of Criminal Justice Education*, 24(2), 218–234.
- Endayani, H. (2018). Sejarah Dan Konsep Pendidikan Ips. *Ittihad*, 11(2), 117–127. <http://ejournalittihad.alittihadiyahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/viewFile/43/36>
- Fatah, R. E. S. (2004). *Mencintai Indonesia dengan amal: refleksi atas fase awal demokratisasi*. Penerbit Republika.
- Galuh Mahardika, M. D., & Nur Ramadhan, F. (2021). Pembelajaran IPS sebagai penguat nasionalisme dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 6(2), 78–91.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi kita*. Pustaka Antara.
- Ida Bagus Made Astawa. (2017). *Pengantar Ilmu Sosial*. Rajawali Pers.
- Ischak SU, D. (1997). *Pendidikan IPS Sekolah Dasar*. Depdikbud.
- Jane Theresia Silaban, Yuwanto, & Lusya Astrika. (2013). Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3).
- Mansur, A. (2006). Implementasi Klarifikasi Nilai Dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1), 44–69.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.
- Nasution, T., & Arafat Lubis, M. (2018). *Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosia*. Samudra Biru.
- Notonagoro. (2013). *Demokrasi Pancasila*. Kencana.
- Nurul Zuriyah. (2014). *Nilai-nilai Karakter Bangsa*. Kencana.

Penanaman nilai ... (Santosa & Hidayat)

Samlawi, F., & Maftuh, B. (1998). *Konsep Dasar IPS*. Depdikbud.

Sapriya. (2009). *Pendidikan IPS*. Rosda Karya.

Sardiman. (2014). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Rahagrafindo persada.

Setiyadi, A. C. (2008). Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey. *At-Ta'dib*, 5, 77–102.

Suhada, I. (2017). *Konsep Dasar IPS*. Remaja Rosdakarya.

Susanti, E., & Endayani, H. (2018). *Buku Konsep Dasar IPS* (N. Dora (ed.)). CV. Widya Puspita.

Syaodih, N. (2009). Metode penelitian pendidikan. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.

Udin S. Winataputra. (2007). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Universitas Terbuka.